

LAPORAN KINERJA 2023

DIREKTORAT STATISTIK
KESEJAHTERAAN RAKYAT



BADAN PUSAT STATISTIK

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang disusun secara periodik. Laporan Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan memperhatikan prinsip *Clean Government* dan *Good Governance*.

Laporan Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat mencerminkan *outcome* atau prestasi kerja direktorat selama 1 (satu) tahun. Laporan ini memberikan informasi yang terukur atas capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2019 dan tertuang secara tertulis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Laporan ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dan dasar perencanaan strategi pelaksanaan tugas dan fungsi guna lebih mengoptimalkan kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat di masa mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi sehingga laporan ini dapat terwujud. Kami sangat mengapresiasi terhadap berbagai kritik dan saran yang konstruktif demi peningkatan kualitas laporan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, 12 Februari 2024

Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat



Ahmad Avenzora

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Maksud dan Tujuan.....	4
1.2.1. Maksud.....	4
1.2.2. Tujuan	4
1.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi	4
1.4 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran	5
1.3.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jabatan.....	5
1.3.2. Pagu Anggaran Tahun 2023.....	7
1.5 Peran Strategis Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	7
1.6 Peran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dalam Reformasi Birokrasi	9
1.7 Potensi dan Permasalahan.....	9
1.8 Sistematika Penyajian Laporan.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	16
2.1.1. Visi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	16
2.1.2. Misi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.....	16
2.1.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	19
2.2 Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023.....	22
2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023.....	22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1. Analisis Capaian Kinerja	28
3.1.1. Capaian persentase publikasi statistik kesejahteraan rakyat yang menyertakan informasi akurasi data.....	30
3.1.2. Persentase indikator statistik kesejahteraan rakyat yang digunakan dalam dokumen RPJMN	34
3.1.3. Persentase indikator statistik kesejahteraan rakyat yang digunakan sebagai indikator SDGs.....	35
3.1.4. Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	37
3.1.5. Persentase aktivitas pembinaan statistik kesejahteraan rakyat yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan	38
3.2. Perkembangan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	40
3.3. Prestasi dan Inovasi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023	43
3.4. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2023	44
BAB IV PENUTUP	50
1.1. Kesimpulan	50
1.2. Rencana Tindak Lanjut	51
LAMPIRAN.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah dan Kebutuhan Pegawai pada Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Menurut Jenis Jabatan, 2023	6
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023.....	23
Tabel 3	Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022-2023 (persen)	29
Tabel 4	Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023	30
Tabel 5	Daftar Publikasi dengan Menyertakan Nilai Akurasi yang Diterbitkan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023	31
Tabel 6	Capaian Kinerja Pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2023.....	33
Tabel 7	Indikator Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Digunakan Sebagai Indikator SDGs Tahun 2023	36
Tabel 8	Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022-2023	41
Tabel 9	Capaian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021-2022	41
Tabel 10	Monitoring Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022 Terhadap Target Kinerja Jangka Menengah Tahun 2020-2024	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Sumber Daya Manusia pada Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Menurut Tingkat Pendidikan, 2023	5
Gambar 2	Visi dan Misi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020-2024....	19
Gambar 3	Peta Strategi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020-2024	21

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Bagan Organisasi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	57
Lampiran 2	Rencana Strategis Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020 – 2024... ..	58
Lampiran 3	Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023	60
Lampiran 4	Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023	63


RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat mengemban tugas dalam penyediaan data dan informasi statistik kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi yang meliputi penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik, diantaranya Statistik Rumah Tangga, Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial, dan Statistik Kesehatan dan Perumahan.

Guna mewujudkan tersedianya data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas, berbagai indikator kinerja dan targetnya disusun dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Sebagai wujud dokumentasi pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, disusun dokumentasi pertanggungjawaban kinerja sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran tahun 2023 yang diikhtisarkan secara jelas dan ringkas pada Laporan Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023.

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat memiliki kegiatan prioritas yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang menjadi sumber sebagian besar data dan informasi yang dihasilkan. Data hasil Susenas digunakan untuk monitoring capaian indikator-indikator SDGs, RPJMN, serta berbagai perencanaan, monitoring, dan evaluasi program-program pembangunan nasional. Evaluasi pelaksanaan fungsi dan tugas Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2023 memperlihatkan capaian yang sangat baik. Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis pada tahun 2023 sebesar 107,4 persen. Demikian pula capaian kinerja pada masing-masing indikator sasaran juga telah mencapai nilai 100 persen atau lebih dan masuk dalam kategori A.

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat juga melakukan inovasi-inovasi dalam rangka pencapaian kinerja di tahun 2023. Dalam rangka pencapaian kinerja “persentase publikasi statistik kesejahteraan rakyat yang menyertakan informasi akurasi data”, diselenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan Statistik Kesejahteraan Rakyat dengan para koordinator/penyusun publikasi statistik kesejahteraan seluruh provinsi di Indonesia. Selain itu guna menyediakan data yang lebih baik, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat telah menerbitkan tambahan publikasi Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2023 yang akan terbit setiap tahun, memajukan target rilis satu publikasi lebih awal dari jadwal



ARC. Berbagai kendala yang ada telah mampu diatasi sehingga capaian kinerja mencapai target sangat baik.

Capaian kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat telah sejalan dengan realisasi anggaran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sebagaimana tercantum pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pusat Statistik Kegiatan 2906 Tahun Anggaran 2023. Total anggaran sebesar Rp 9.184.314.000 mampu direalisasikan sebesar Rp 2.769.962.725 atau dengan kata lain daya serap anggaran mencapai 30,20 persen. Anggaran yang tidak terealisasi pada tahun 2023 adalah anggaran keterpaduan yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Biro Umum. Sedangkan kinerja anggaran yang dikelola oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sendiri tanpa memperhitungkan anggaran keterpaduan, sudah cukup baik yaitu sebesar 95,5 persen.

PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
- Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran
- Potensi dan Permasalahan
- Sistematika Penyajian Laporan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan wujud dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014. Ringkasan capaian dari kegiatan dan output kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja memuat informasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah dan unit kerja khususnya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah antara lain:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023 merupakan laporan yang berisi target, sasaran, dan realisasi terhadap tugas dan tanggung jawab Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat periode tahun 2023. Selanjutnya, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan laporan kinerja setiap tahun. Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023.

1.2.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat selama tahun 2023. Penyusunan laporan kinerja merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas serta memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.

1.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 07 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat bertugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pusat Statistik. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik rumah tangga;
2. pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik pendidikan dan kesejahteraan sosial; dan
3. pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik kesehatan dan perumahan.

Susunan Organisasi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional untuk mengakomodasi rencana strategis Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020-2024.

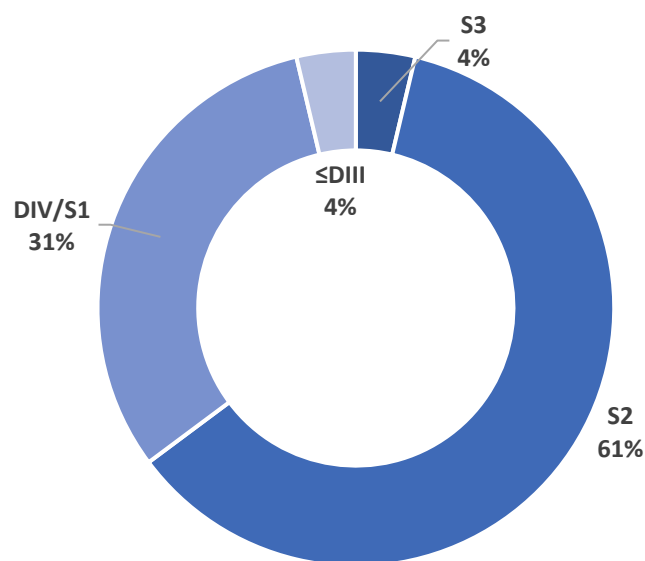
1.4 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran

3.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jabatan

Jumlah sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat pada akhir tahun 2023 yaitu sebanyak 54 orang, dengan 2 orang sedang tugas belajar. Berdasarkan tingkat pendidikannya, SDM di Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berpendidikan S3 sebanyak 2 orang (4 persen), berpendidikan S2 sebanyak 33 orang (61 persen), berpendidikan S1/DIV sebanyak 17 orang (31 persen), dan berpendidikan D3 ke bawah sebanyak 2 orang (4 persen).

Komposisi SDM yang berada di Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dengan latar belakang pendidikan sebagian besar berasal dari bidang statistik, sudah sangat mendukung dalam menyelesaikan tupoksi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. Komposisi SDM di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat dari Gambar 1.

Gambar 1
Sumber Daya Manusia pada Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
Menurut Tingkat Pendidikan, 2023



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 7, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikelompokkan menurut kebutuhan jumlah dan jenis jabatan yang terdiri dari: Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Fungsional (JF); dan Jabatan Administrasi (JA). Di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat terdapat 1 orang pimpinan tinggi Pratama yang membawahi 49 orang pejabat fungsional, termasuk yang saat ini sedang menempuh tugas belajar, dan 4 orang staf.

Ditinjau dari jabatan fungsional, seluruh pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat merupakan fungsional statistisi yang terdiri dari 1 orang Statistisi Ahli Utama, 12 orang Statistisi Ahli Madya, 23 orang Statistisi Ahli Muda, 12 orang Statistisi Ahli Pertama, dan 1 orang Statistisi Mahir. Selain itu, terdapat 4 orang pegawai lainnya merupakan staf pengolah data dan 1 orang sekretaris non-ASN. Komposisi tersebut belum memenuhi seluruh kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sesuai Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 281 Tahun 2021 tentang Rekapitulasi Jabatan Hasil Analisis Beban Kerja (ABK) di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2021, sebagaimana tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1
Jumlah dan Kebutuhan Pegawai pada Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Menurut Jenis Jabatan, 2023

No	Jabatan Fungsional	Kebutuhan Pegawai	Kondisi Tahun 2023	Persentase
1	Statistisi Ahli Utama	1	1	100
2	Statistisi Ahli Madya	15	12	80
3	Statistisi Ahli Muda	23	23	100
4	Statistisi Ahli Pertama	25	12	48
5	Statistisi Mahir	1	1	100
6	Arsiparis Ahli Pertama	1	0	0
7	Arsiparis Terampil	1	0	0
8	Pengolah Data	2	4	200
9	Sekretaris	1	1 ^{*)}	100
Jumlah		70	54 ^{**)}	70

Keterangan :

*) non-ASN

**) Jumlah tanpa pegawai non-ASN

Berdasarkan Tabel 1, diperoleh informasi bahwa terdapat tiga Jabatan Fungsional yang sudah terpenuhi berdasarkan ABK tahun 2021, yakni Statistisi Ahli Utama, Statistisi Ahli Muda, dan Statistisi Mahir. Sementara itu, jabatan fungsional lainnya masih belum terpenuhi sesuai dengan kebutuhan ABK.

3.2. Pagu Anggaran Tahun 2023

Dari sisi anggaran, guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2023, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 9.542.316,- yang dituangkan pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Anggaran tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) komponen kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembinaan Statistik sektoral Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp110.498.000,-
2. Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp1.974.763.000,-
3. Publikasi/Laporan Susenas sebesar Rp7.457.055.000,-

1.5 Peran Strategis Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Visi Badan Pusat Statistik seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024 adalah sebagai “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”. Untuk mencapai visi tersebut, BPS telah melakukan upaya perubahan dan pengembangan, baik dari sisi tata laksana kegiatan teknis maupun administrasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat berperan secara teknis untuk mengakomodasi beberapa indikator yang mejadi target RPJMN 2020-2024 dan indikator global yang terdapat dalam SDGs melalui data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Diantaraa 55 dari 136 indikator SDGs Indonesia dihasilkan dari Susenas. Sedangkan pada level nasional, Susenas mampu mendukung 2 dari 7 Agenda Pembangunan, yaitu meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (Prioritas Nasional ke-3) dan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (Prioritas Nasional ke-4).

Dalam rangka mengemban tugas dan fungsinya, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat menetapkan pedoman kerja yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan BPS dalam Rencana Strategis Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2020-2024. Visi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sesuai Reviu Rencana Strategis Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020-2024 adalah “Penyedia Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Berkualitas untuk Indonesia Maju”. Visi, misi, dan tujuan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat kemudian dituangkan dalam suatu rencana kegiatan berupa Perjanjian Kinerja (PK) di

setiap awal tahun anggaran yang selaras dengan Rencana Strategis Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020-2024.

Secara umum, berbagai tantangan yang dihadapi oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan standar dalam *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM) dalam melakukan kegiatan statistik kesejahteraan rakyat.
2. Memastikan penggunaan standar yang sesuai dengan konsep nasional dan internasional dalam menyelenggarakan statistik kesejahteraan rakyat.
3. Memastikan kemutakhiran data statistik kesejahteraan rakyat.
4. Melakukan koordinasi untuk dapat meningkatkan kualitas metodologi data statistik kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan penerapan *Small Area Estimation* (SAE) dalam penyediaan data statistik kesejahteraan rakyat.
6. Pemanfaatan *Big Data* dalam mendukung penyediaan data statistik kesejahteraan rakyat.
7. Melaksanakan penjaminan kualitas pada penyelenggaraan kegiatan statistik dasar dan statistik sektoral/khusus oleh K/L/D/I di bidang kesejahteraan rakyat.
8. Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina SSN (Sistem Statistik Nasional) di bidang kesejahteraan rakyat.
9. Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral di bidang kesejahteraan rakyat
10. Memaksimalkan peran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dalam mendukung peran BPS untuk mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI) di bidang kesejahteraan rakyat
11. Membina stakeholder dalam produksi kegiatan data sektoral di Bidang Statistik Kesra yang memenuhi standar GSBPM.
12. Melakukan pembinaan statistik sektoral maupun statisik khusus di K/L/D/I di Bidang Kesra.
13. Melakukan koordinasi dengan K/L/D/I dalam menghasilkan statistik dasar Bidang Kesra yang berkualitas.
14. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pejabat fungsional statistisi dalam mewujudkan peran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sebagai pembina data statistik kesejahteraan rakyat.

1.6 Peran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dalam Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) yang dilaksanakan BPS merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan instansi pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani dengan baik. Pelaksanaan RB ini mencakup 8 area perubahan, yaitu: manajemen perubahan; penataan dan penguatan organisasi; penataan peraturan perundang-undangan; penataan SDM; penataan tata laksana; penguatan pengawasan; penguatan akuntabilitas kinerja; serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kepala BPS melalui Keputusan Kepala BPS Nomor 120 tahun 2018 membentuk Tim Kerja Reformasi Birokrasi BPS yang bertugas untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Berdasarkan keputusan tersebut, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat turut berperan mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat antara lain adalah:

- a. Pembentukan tim Reformasi Birokrasi yang terdiri atas *Change Champion* (CC) dan *Change Agent Network* (CAN).
- b. Terlibatnya Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua Asesor di Kedeputian Bidang Statistik Sosial.
- c. Internalisasi *Core Value* Indonesia berAkhlak.
- d. Sosialisasi Anti Gratifikasi dan Benturan Kepentingan.
- e. Pelaksanaan Susenas panel untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana amanat Presiden dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- f. Penyediaan indikator capaian revolusi mental baik di level pusat maupun provinsi guna mengukur kinerja pemerintah sejalan dengan amanat Presiden dalam Inpres Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental

1.7 Potensi dan Permasalahan

Identifikasi berbagai potensi yang telah dimiliki oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut:

1. Data Susenas yang bersifat strategis untuk mengakomodasi indikator-indikator pembangunan yang dapat disandingkan, baik pada tataran regional, nasional maupun global.
2. Pada sisi internal, data dasar sosial ekonomi yang berasal dari Susenas 2022 dan 2023 dapat diolah menjadi berbagai publikasi ARC untuk menggambarkan statistik rumah tangga; statistik pendidikan dan kesejahteraan sosial; dan statistik kesehatan dan perumahan, yaitu : Publikasi Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia, September 2022; Publikasi Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi, September 2022; Publikasi Pengeluaran Konsumsi Penduduk Indonesia Per Provinsi, September 2022; Publikasi Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia September 2022; Publikasi Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia, Maret 2023; Publikasi Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi, Maret 2023; Publikasi Pengeluaran Konsumsi Penduduk Indonesia Per Provinsi, Maret 2023; Publikasi Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia Maret 2023; Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023; Statistik Pendidikan 2023; Statistik Pemuda Indonesia 2023; Statistik Penduduk Lanjut Usia 2023; Profil Anak Usia Dini 2023; Statistik Kesehatan 2022; Statistik Perumahan dan Permukiman 2022; Profil Statistik Kesehatan 2023; Perempuan dan Laki-laki di Indonesia 2023; Women and Men in Indonesia 2023; Infografis Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023; Indikator SDGs Kesejahteraan Rakyat 2023; Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2023.
3. Pada sisi eksternal (user data), data dasar sosial ekonomi yang berasal dari Susenas 2022 juga menjadi indikator pendukung dalam penghitungan berbagai indeks yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) berbagai Kementerian/Lembaga yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024, yaitu : Indeks Perlindungan Anak (IPA) 2022; Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) 2022; Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) 2022; Indeks Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila (IAP) 2022; Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 2022; Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) 2022; Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 2022; Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) 2022; dan Profil Pendidikan Vokasi 2022; Indeks Kualitas Keluarga (IKK) 2022. Dalam rangka mendukung percepatan penanganan *stunting*, BPS bekerjasama dengan Setwapres untuk menghasilkan Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS) 2021-2022.
4. Mendukung program kerjasama dengan UNICEF dalam bentuk Modeling Statistik untuk Estimation Projections ECDI Nasional 2024-2030

5. Kerjasama Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dengan UNICEF juga memberikan peningkatan kapasitas untuk menghasilkan data Susenas yang lebih berkualitas. Pendampingan teknis yang diterima dari UNICEF pada tahun 2023 diantaranya adalah dalam pengembangan kuesioner Susenas tentang pemberian ASI dan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI), pengolahan indikator gizi dan kesehatan anak, serta terbitnya publikasi Kesejahteraan Anak Indonesia: Analisis Kemiskinan Anak Moneter 2022 dan Kesejahteraan Anak Indonesia: Analisis Deprivasi Hak Anak Multidimensi 2022.

Permasalahan yang berkaitan dengan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut:

1. Belum dilakukannya identifikasi kebutuhan Kementerian/Lembaga sebagai dasar pelaksanaan pembinaan statistik sektoral. Dengan dibentuknya Tim Penilai Badan (TPB) guna menilai hasil Evaluasi Pembangunan Statistik Sektoral (EPSS) secara mandiri dari K/L diharapkan mampu menjadi solusi permasalahan tersebut.
2. Pembinaan statistik sektoral yang selama ini dilakukan masih bersifat asistensi dalam menghitung indikator kinerja Kementerian/Lembaga karena belum tersedianya SDM yang mumpuni pada masing-masing Kementerian/Lembaga tersebut
3. Pembinaan statistik dalam hal *sharing knowledge* mengenai Susenas, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data masih bersifat *ad-hoc* dalam artian tergantung pada permintaan dari K/L.
4. Dibutuhkan koordinasi lebih lanjut lintas Direktorat untuk mendukung publikasi di Lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang menggunakan sumber data selain Susenas.

1.8 Sistematika Penyajian Laporan

Laporan Akuntabilitas Kinerja pada dasarnya mengkomunikasikan pencapaian kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS tahun 2023. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. Analisis atas capaian kinerja akan memungkinkan teridentifikasinya kendala dan hambatan untuk perbaikan kinerja di masa datang. Oleh karena itu, sistematika penyajian Laporan kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif

Disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis serta sejauh mana Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik mencapai tujuan dan sasaran utama serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Dijelaskan juga langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan latar belakang; dasar hukum; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat; sumber daya manusia dan dukungan anggaran; peran strategis Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat; pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat; potensi dan permasalahan serta sistematika penyajian laporan.

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023. Pada bab ini akan disampaikan visi dan misi, kebijakan dan program indikator serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan hasil pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipasi yang akan diambil dan disajikan pula alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Capaian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023, Perkembangan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, Capaian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat terhadap Target Renstra 2020-2024 dan Realisasi Anggaran tahun 2023.

Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS serta strategi pemecahan masalah serta langkah yang akan dilakukan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat untuk meningkatkan kinerjanya di tahun mendatang.

Lampiran

PERENCANAAN KINERJA

- Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
- Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023
- Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

2.1.1. Visi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta merupakan wujud peran serta Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dalam rangka mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia Maju, maka visi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020–2024 adalah:

“Penyedia Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Berkualitas untuk Indonesia Maju”

Visi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020–2024 ini juga telah diselaraskan dengan Visi Kedeputian Bidang Statistik Sosial, yaitu “Penyedia Data Statistik Sosial Berkualitas untuk Indonesia Maju” dan sesuai dengan Visi Badan Pusat Statistik, yaitu “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”. Dengan demikian, Visi Direktorat Statistik Kesejahteraan rakyat 2020–2024 ini menunjang peran Kedeputian Bidang Statistik Sosial maupun Badan Pusat Statistik dalam memberikan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas baik di tingkat nasional maupun internasional. Visi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020–2024 juga merupakan perwujudan penguatan peran Badan Pusat Statistik sebagai pembina data statistik yang turut mengupayakan pembinaan data berkualitas untuk kebutuhan data sektoral.

2.1.2. Misi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Misi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan kewenangan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang diselaraskan dengan Misi Kedeputian Bidang Statistik Sosial dan Misi Badan Pusat Statistik. Misi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat adalah turunan dari Visi dan Misi Badan Pusat Statistik yang merupakan pelaksanaan Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020–2024 yang ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing), dan yang ke-3 (Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan).

Adapun rincian Misi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan statistik kesejahteraan rakyat berkualitas yang berstandar nasional dan internasional.

Peran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat selaras dengan peran Badan Pusat Statistik, yaitu sebagai penyelenggara statistik dasar di bidang kesejahteraan rakyat. Statistik dasar dapat diartikan sebagai statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Perpres No.86 tahun 2007). Kualitas suatu output statistik dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang/dimensi. Oleh karena itu, pengukuran kualitas ditentukan melalui pemenuhan sekumpulan dimensi kualitas (Statistik Korea, n.d.:10; Helfert & Foley, 2009:187).

Dalam mengukur kualitas, setidaknya terdapat 6 (enam) dimensi kualitas statistik yang digunakan oleh Direktorat Statistik kesejahteraan Rakyat yang selaras dengan kualitas statistik yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik, yaitu: relevansi (*relevance*), akurasi (*accuracy*), aktualitas (*timeliness*) dan tepat waktu (*punctuality*), aksesibilitas (*accessibility*), koherensi (*coherence*) dan keterbandingan (*comparability*), serta interpretabilitas (*interpretability*). Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat memiliki pedoman yang sama dengan Badan Pusat Statistik, yaitu mengacu kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam “*Fundamental Principle of Official Statistics*”.

2. Membina Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi terkait bidang statistik kesejahteraan rakyat melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan.

Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan (UU No. 16 Tahun 1997). Badan Pusat Statistik memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. Hal ini sejalan dengan mandat yang diemban Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral di bidang kesejahteraan rakyat. Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat juga mengemban mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi, dan

sinkronisasi dengan instansi pemerintah dalam membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerja sama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik). Demikian pula diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang merupakan unit di bawah Badan Pusat Statistik, bertindak sebagai pembina data statistik khususnya terkait kesejahteraan rakyat, dengan tugas menetapkan struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik kesejahteraan rakyat untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.

Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat pengguna produk statistik kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan oleh seluruh jajaran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Tidak hanya mencakup kepuasan pengguna pada produk statistik kesejahteraan rakyat, pelayanan prima juga mencakup peran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sebagai pembina dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang harus mampu memenuhi kebutuhan rujukan data statistik sektoral dan khusus yang diselenggarakan bersama dengan Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi.

4. Membangun sumber daya manusia di Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah.

Sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang unggul dan adaptif tercermin pada citra diri insan statistik yang meliputi: nilai inti profesional, integritas, dan amanah. Nilai inti profesional tercermin pada citra diri insan statistik yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas. Selanjutnya citra diri insan statistik berintegritas terlihat pada sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya dengan penuh dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan

pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur). Nilai inti amanah tercermin pada setiap tindakan dan sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik.

Gambar 2

Visi dan Misi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020-2024

Visi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020-2024
“Penyedia Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Berkualitas untuk Indonesia Maju”

Misi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020-2024

- 1 Menyediakan statistik kesejahteraan rakyat berkualitas yang berstandar nasional dan internasional.
- 2 Membina Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi terkait bidang statistik kesejahteraan rakyat melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan.
- 3 Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik kesejahteraan rakyat untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.
- 4 Membangun sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan yang ditetapkan oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat merupakan tujuan yang mendukung berbagai peran dan tugas yang diamanatkan oleh Undang-undang terhadap Badan Pusat Statistik. Tujuan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat juga merupakan upaya guna mendukung upaya pencapaian visi dan misi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020-2024. Berbagai tujuan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat memuat misi yang ditetapkan sebagaimana dijelaskan berikut ini:

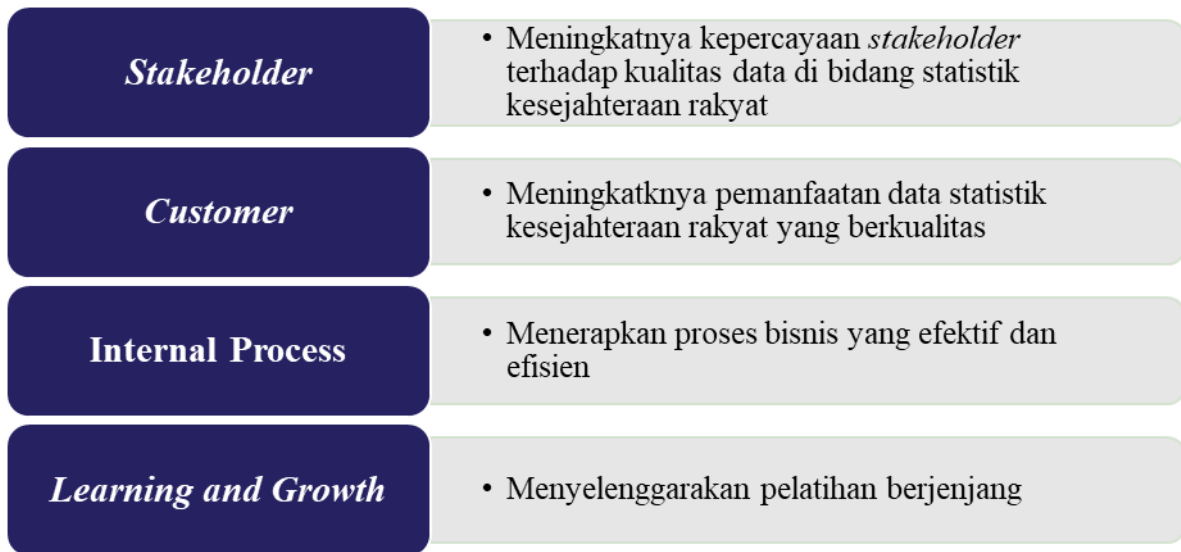
Tujuan 1 : Menyediakan data statistik kesejahteraan rakyat untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait dengan:

- Misi ke-1 : Menyediakan statistik kesejahteraan rakyat berkualitas yang berstandar nasional dan internasional.
- Tujuan 2 : Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional di bidang kesejahteraan rakyat, terkait dengan:
- Misi ke-2 : Membina Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi terkait bidang statistik kesejahteraan rakyat melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan.
- Tujuan 3 : Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional di bidang kesejahteraan rakyat, terkait dengan:
- Misi ke-3 : Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik kesejahteraan rakyat untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.
- Tujuan 4 : Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, terkait dengan:
- Misi ke-4 : Membangun sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah.

Penjabaran Misi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat di atas juga berpedoman pada penjabaran Misi Badan Pusat Statistik, yaitu 4 (empat) misi dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi ke dalam 4 perspektif. Perspektif tersebut antara lain: perspektif *stakeholders*, perspektif *customers*, perspektif *internal process*, dan perspektif *learning and growth*. Pendekatan ini digunakan agar implementasi dalam pencapaian sasaran strategis dari sistem penganggaran yang dikombinasikan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dan logik model *framework* dalam penataan arsitektur kinerja program dan kegiatan menjadi lebih mudah.

Gambar 3

Peta Strategi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020-2024



Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis guna mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang telah ditetapkan sebelumnya. Sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat akan diwujudkan pada periode 2020-2024. Sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik kesejahteraan rakyat yang berkualitas.
Indikator kinerja utama pada sasaran strategis ini, yaitu:
 - a. Persentase publikasi statistik kesejahteraan rakyat yang menyertakan informasi akurasi data;
 - b. Persentase Indikator statistik kesejahteraan rakyat yang digunakan dalam dokumen RPJMN;
 - c. Persentase indikator statistik kesejahteraan rakyat yang digunakan sebagai indikator SDGs.
2. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional di bidang statistik kesejahteraan rakyat.
Indikator kinerja utama pada sasaran strategis ini, yaitu:
 - a. Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat;
Persentase aktivitas pembinaan statistik kesejahteraan rakyat yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan.

2.2 Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023

Dalam menjalankan tugas dibidang perstatistikan nasional, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020–2024 yang mengacu pada Renstra Badan Pusat Statistik 2020–2024. Renstra tersebut disusun guna memberikan arah dan sasaran yang jelas sekaligus sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan statistik yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2005–2025 dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2020–2024.

2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023

Untuk lebih mengikat komitmen pencapaiannya, pada awal tahun 2023 ditetapkan target kinerja dari masing-masing indikator kinerja, tujuan, dan sasaran strategis yang harus dicapai selama satu tahun. Hal tersebut dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023. PK yang telah disetujui oleh Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat ini merupakan *Performance Agreement* antara Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat dengan Deputi Bidang Statistik Sosial. Perjanjian kinerja ini menjadi acuan pelaksanaan kegiatan, dalam proses manajemen kinerja sehingga dapat menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan dengan lebih baik dan dapat mendorong peningkatan kinerja Direktorat Statistisik Kesejahteraan Rakyat. Perjanjian Kinerja ini juga digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan dan sebagai evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan yang dapat dicapai selama tahun 2023. Adapun rincian perjanjian kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2023 ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1: Menyediakan data statistik kesejahteraan rakyat untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan.			
Sasaran 1: Meningkatnya pemanfaatan data statistik kesejahteraan rakyat yang berkualitas.	Persentase publikasi statistik kesejahteraan rakyat yang menyertakan informasi akurasi data	Persen	100
	Persentase indikator statistik kesejahteraan rakyat yang digunakan dalam dokumen RPJMN	Persen	100
	Persentase indikator statistik kesejahteraan rakyat yang digunakan sebagai indikator SDGs	Persen	100
Tujuan 2: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional di bidang statistik kesejahteraan rakyat.			
Sasaran 2: Penguatan statistik sektoral di K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Persen	100
	Persentase aktivitas pembinaan statistik kesejahteraan rakyat yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan	Persen	100

AKUNTABILITAS KINERJA

- Analisis Capaian Kinerja
- Prestasi dan Inovasi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023
- Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2023



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja berfungsi sebagai monitoring pencapaian kinerja serta membandingkan antara rencana kinerja dengan capaian pada setiap indikator kinerja. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan/program/kegiatan di masa yang akan datang.

Analisis kinerja terdiri dari keberhasilan, kegagalan, tingkat efisiensi, hambatan/kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif untuk lebih meningkatkan kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat di masa yang akan datang. Dalam melakukan pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis atas perbandingan antara:

1. Realisasi kinerja tahun 2023 dengan kinerja yang direncanakan pada tahun 2023
2. Realisasi kinerja tahun 2023 dengan kinerja tahun 2022
3. Perkembangan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya
4. Realisasi kinerja tahun 2023 dengan kinerja yang direncanakan Jangka Menengah (tahun 2024)

Pada tahun 2022, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat mempunyai 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU). Seluruh sasaran dan IKU telah diukur capaian kerjanya setiap triwulan.

Capaian kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat merupakan pencapaian dari indikator-indikator tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2023 dan dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target Indikator Kinerja utama pada masing-masing tujuan maupun sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja, dan sebaliknya semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan tersebut akan menjadi capaian Indikator apabila nilainya sama atau kurang dari 120 persen. Bagi Indikator yang nilai capaiannya lebih dari 120 persen, maka nilai capaian kinerja yang disajikan pada laporan kinerja adalah 120 persen. Sementara, simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut:

- a. 100% atau lebih = Sangat Baik (A)
- b. 75% sampai 99% = Baik (B)
- c. 55% sampai 74% = Cukup (C)
- d. Kurang dari 54% = Kurang (K)

3.1. Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja dari tujuan pertama Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yaitu "Menyediakan data statistik kesejahteraan rakyat untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan" dihitung dari nilai rata-rata capaian 3 (tiga) indikator, sedangkan capaian kinerja tujuan yang kedua yaitu "Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional dibidang kesejahteraan rakyat" dihitung dari 2 (dua) indikator. Seluruh indikator tersebut telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis pada tahun 2023 sebesar 107,4 persen, dapat dilihat lebih detail pada Tabel 3.

Rata-rata capaian pada indikator sasaran adalah masing-masing sebesar 102,0 persen pada sasaran "Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas" dan sebesar 112,9 persen pada sasaran "Meningkatnya Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I di Bidang Kesejahteraan Rakyat". Dengan demikian dapat disimpulkan rata-rata capaian kinerja baik dari keseluruhan indikator tujuan maupun pada masing-masing indikator sasaran telah mencapai nilai 100 persen atau lebih dan masuk dalam kategori A.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022, terdapat peningkatan sebesar 2,0 persen untuk capaian indikator pada tujuan pertama Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yaitu "Menyediakan data statistik kesejahteraan rakyat untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan". Peningkatan tersebut didorong oleh capaian

indikator sasaran “Meningkatnya pemanfaatan data statistik kesejahteraan rakyat yang berkualitas” yang mengalami peningkatan dari 100,0 persen pada tahun 2022 menjadi 102,0 persen pada tahun 2023.

Tabel 3
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022-2023 (persen)

Indikator	Uraian	2022	2023
Tujuan 1	Menyediakan Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Untuk Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan	100,0%	102,0%
Sasaran 1	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas	100,0%	102,0%
Tujuan 2	Meningkatnya Pelayanan Prima Dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional Dibidang Kesejahteraan Rakyat	114,9%	112,9%
Sasaran 2	Meningkatnya Penguatan Statistik Sektor K/L/D/I di Bidang Kesejahteraan Rakyat	114,9%	112,9%

Pada sasaran “Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas”, terdapat indikator kinerja telah mencapai nilai di atas 100 persen yaitu “Persentase publikasi statistik kesejahteraan rakyat yang menyertakan informasi akurasi data” dengan capaian sebesar 105,9 persen. Sementara, pada sasaran “Meningkatnya Penguatan Statistik Sektor K/L/D/I di Bidang Kesejahteraan Rakyat”, capaian seluruh indikator telah melebihi 100 persen. Capaian dan kategori pada masing-masing indikator dapat dilihat pada pada Tabel 4.

Tabel 4
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategi
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023

Kode	Uraian	Satuan	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat			Nilai
			Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
T1	Menyediakan data statistik kesejahteraan rakyat untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan.					
S1	Meningkatnya pemanfaatan data statistik kesejahteraan rakyat yang berkualitas					
1.1	Persentase publikasi statistik kesejahteraan rakyat yang menyertakan informasi akurasi data	Persen	100,0	105,9	105,9	A
1.2	Persentase indikator statistik kesejahteraan rakyat yang digunakan dalam dokumen RPJMN	Persen	100,0	100,0	100,0	A
1.3	Persentase indikator statistik kesejahteraan rakyat yang digunakan sebagai indikator SDGs	Persen	100,0	100,0	100,0	A
T2	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional dibidang kesejahteraan rakyat.					
S2	Meningkatnya Penguatan Statistik Sektor K/L/D/I di Bidang Kesejahteraan Rakyat.					
2.1	Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Persen	100,0	109,1	109,1	A
2.2	Persentase aktivitas pembinaan statistik kesejahteraan rakyat yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan	Persen	100,0	116,7	116,7	A

3.1.1. Capaian persentase publikasi statistik kesejahteraan rakyat yang menyertakan informasi akurasi data

Pengukuran indikator “Persentase publikasi statistik kesejahteraan rakyat yang menyertakan informasi akurasi data” dilakukan dengan cara membandingkan target jumlah publikasi yang menyertakan nilai akurasi dengan realisasi jumlah publikasi yang diterbitkan dengan menyertakan nilai akurasi. Nilai akurasi dalam publikasi ditunjukkan melalui tabel

nilai *Relative Standard Error* (RSE). Seluruh publikasi yang dihasilkan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat menggunakan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) baik dari kuesioner kor, modul maupun konsumsi dan pengeluaran (KP). Dalam suatu survei terdapat kesalahan (error) yang disebabkan *sampling error* dan *non sampling error*. RSE dapat digunakan untuk mengukur tingkat presisi dari suatu nilai estimasi. RSE merupakan rasio dari nilai *standard error* dengan nilai estimasi dari suatu variabel/indikator yang dinyatakan dalam persentase. Estimasi suatu indikator dapat dikatakan tepat menggambarkan nilai yang sebenarnya jika memiliki nilai $RSE < 25$ persen, sebaliknya jika memiliki $RSE \geq 25$ persen maka dianggap tidak presisi. RSE yang tinggi (≥ 25 persen) merupakan suatu indikasi bahwa sampel tidak mencukupi, sehingga estimasi indikator yang dihasilkan sebaiknya tidak digunakan.

Target capaian kinerja “persentase publikasi statistik kesejahteraan rakyat yang menyertakan informasi akurasi data” adalah 100 persen dengan realisasi sebesar 105,9 persen. Pada tahun 2023, terdapat 17 publikasi dengan jadwal ARC yang diterbitkan oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dimana seluruhnya menyertakan tabel RSE dari indikator-indikator yang disajikan. Daftar publikasi dengan menyertakan nilai akurasi yang diterbitkan oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2022 disampaikan pada Tabel 5.

Tabel 5
Daftar Publikasi dengan Menyertakan Nilai Akurasi yang Diterbitkan
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023

No.	Judul Publikasi	Sumber Data	Jadwal ARC
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia, September 2022	Susenas KP September 2022	23 Juni 2023
2	Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi, September 2022	Susenas KP September 2022	23 Juni 2023
3	Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Provinsi, September 2022	Susenas KP September 2022	23 Juni 2023
4	Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia, September 2022	Susenas KP September 2022	23 Juni 2023
5	Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia, Maret 2023	Susenas KP Maret 2023	20 Oktober 2023
6	Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi, Maret 2023	Susenas KP Maret 2023	20 Oktober 2023
7	Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Provinsi, Maret 2023	Susenas KP Maret 2023	20 Oktober 2023
8	Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia, Maret 2023	Susenas KP Maret 2023	20 Oktober 2023

No.	Judul Publikasi	Sumber Data	Jadwal ARC
9	Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023	Susenas Kor Maret 2023	27 Oktober 2023
10	Statistik Pendidikan 2023	Susenas Kor Maret 2023	24 November 2023
11	Statistik Pemuda Indonesia 2023	Susenas Kor Maret 2023	29 Desember 2023
12	Statistik Penduduk Lanjut Usia 2023	Susenas Kor Maret 2023	29 Desember 2023
13	Profil Anak Usia Dini 2023	Susenas Kor Maret 2023	12 Desember 2023
14	Statistik Kesehatan 2022	Susenas MKP September 2022	31 Agustus 2023
15	Statistik Perumahan dan Permukiman 2022	Susenas MKP September 2022	31 Agustus 2023
16	Profil Statistik Kesehatan 2023	Susenas Kor Maret 2023	20 Desember 2023
17	Perkembangan SDGs Kesejahteraan Rakyat 2023	Susenas Kor Maret 2023	29 Desember 2023
18	Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2023	Susenas Kor Maret 2023	29 Desember 2023

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat melakukan inovasi-inovasi dalam rangka pencapaian kinerja “persentase publikasi statistik kesejahteraan rakyat yang menyertakan informasi akurasi data” di tahun 2023. Inovasi yang dilaksanakan adalah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan Statistik Kesejahteraan Rakyat dengan para koordinator/penyusun publikasi statistik kesejahteraan seluruh provinsi di Indonesia. Selain untuk koordinasi dalam penyusunan publikasi statistik kesejahteraan rakyat, kegiatan ini juga memfasilitasi peningkatan kapasitas koordinator/ penyusun publikasi statistik kesejahteraan baik di pusat maupun daerah dengan menghadirkan narasumber yang menyampaikan materi mengenai standar publikasi BPS, penghitungan penimbang Susenas, proyeksi penduduk hasil SP2020, metadata indikator dan statistik kesejahteraan rakyat, tantangan dalam menganalisis data, serta pemanfaatan data Susenas dalam analisis siklus hidup manusia. Pada tahun 2023 ini terdapat tambahan satu publikasi dengan menyertakan nilai akurasi yang diterbitkan oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan yaitu Publikasi Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2023. Publikasi tersebut biasanya diterbitkan setiap dua tahun dan terakhir kali diterbitkan pada tahun 2022, guna menyediakan data yang kontinyu untuk pengguna data maka pada tahun 2023 publikasi tersebut kembali diterbitkan.

Capaian kinerja “persentase publikasi statistik kesejahteraan rakyat yang menyertakan informasi akurasi data” pada tahun 2023 didukung oleh capaian pelaksanaan Susenas. Terdapat 2 (dua) ukuran kinerja pelaksanaan Susenas yaitu “Jumlah rilis data statistik yang tepat waktu” dan “Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei”. Capaian kinerja Susenas pada kedua ukuran kinerja tersebut disampaikan dalam tabel 6.

Tabel 6
Capaian Kinerja Pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2023

No.	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah rilis data statistik yang tepat waktu	Rilis	2	2	100,0
1.a	Susenas Maret 2023	Rilis	1	1	100,0
1.b	Susenas September 2022	Rilis	1	1	100,0
2	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei	Persen	96,0	99,2	103,4
2.a	Susenas Maret 2023	Persen	96,0	98,2	103,4

Seluruh publikasi yang diterbitkan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Menggunakan Data Susenas sebagai sumber data utama. Oleh karena itu, kendala dan tantangan dalam pencapaian kinerja “persentase publikasi statistik kesejahteraan rakyat yang menyertakan informasi akurasi data” sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan Susenas. Pada tahun 2023 ini pelatihan petugas Susenas dapat dilaksanakan secara tatap muka di setiap Kabupaten/Kota namun lamanya waktu pelatihan yang hanya dua hari dirasakan menjadi kendala dalam penyampaian materi Susenas yang cukup banyak. Kendala ini diatasi dengan membuat jadwal pelatihan hingga malam hari.

Kendala lainnya yang dihadapi dalam penerbitan publikasi di triwulan III tahun 2023 adalah kekosongan jabatan Kepala BPS sehingga menghambat penandatanganan kata pengantar pada publikasi yang akan terbit. Setelah berkoordinasi dengan Direktorat Diseminasi Statistik, solusi untuk kendala tersebut adalah kata pengantar ditandatangani oleh Deputi Bidang Statistik Sosial. Selain itu, rilis publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat dinilai terlalu jauh dengan jadwal rilis data kemiskinan yang bersumber dari data Susenas pada periode yang sama. Menanggapi tantangan tersebut, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat memajukan target rilis publikasi satu bulan lebih awal dari jadwal ARC.

3.1.2. Persentase indikator statistik kesejahteraan rakyat yang digunakan dalam dokumen RPJMN

Persentase indikator statistik kesejahteraan rakyat yang digunakan dalam dokumen RPJMN menunjukkan kemampuan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang digunakan dalam dokumen RPJMN sebagai dasar rujukan dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Capaian kinerja indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah indikator statistik Kesejahteraan Rakyat yang digunakan dalam dokumen RPJMN dengan jumlah indikator RPJMN yang harus disediakan oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.

Target capaian kinerja “persentase indikator statistik kesejahteraan rakyat yang digunakan dalam dokumen RPJMN” adalah 100 persen dengan realisasi sebesar 100 persen. Pada dokumen RPJMN 2020-2024 terdapat 8 indikator yang secara langsung dihitung dari data Susenas. Indikator-indikator tersebut disajikan dalam publikasi yang diterbitkan BPS maupun dalam tabel dinamis di *website* BPS. Daftar indikator RPJMN yang dihasilkan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah
2. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
3. Harapan Lama Sekolah
4. Tingkat Penyelesaian Pendidikan menurut jenjang:
 - SD/MI/ sederajat
 - SMP/MTs/ sederajat
 - SMA/SMK/MA/ sederajat"
5. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (PT)
6. Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini
7. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 Persen Termiskin dan 20 Persen Terkaya menurut jenjang:
 - SMA/SMK/MA/ Sederajat
 - Pendidikan Tinggi
8. Proporsi perempuan umur 20 – 24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun

Indikator dalam dokumen RPJMN 2020-2024 tidak akan mengalami perubahan selama periode RPJMN yang bersesuaian, oleh karena itu variabel-variabel yang menjadi dasar penghitungan indikator RPJMN menjadi prioritas untuk dikumpulkan datanya melalui Susenas. Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sudah secara rutin menyediakan indikator RPJMN, sehingga relatif tidak ditemui kendala dalam pencapaian kinerja indikator ini. Tantangan yang dihadapi terkait pencapaian indikator ini adalah konsistensi dan ketepatan dalam penghitungan indikator-indikator RPJMN yang bersumber dari Susenas. Strategi dalam menghadapi tantangan tersebut adalah menjaga konsistensi kode nomor pertanyaan dalam kuesioner Susenas setiap tahun sehingga tidak memengaruhi *syntax* pengolahan untuk indikator-indikator RPJMN.

3.1.3. Persentase indikator statistik kesejahteraan rakyat yang digunakan sebagai indikator SDGs

Persentase indikator statistik kesejahteraan rakyat yang digunakan sebagai indikator Sustainable Development Goals (SDGs) menunjukkan kemampuan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat untuk menghasilkan data dan informasi statistik Kesejahteraan Rakyat yang digunakan sebagai indikator SDGs. Capaian kinerja indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah indikator SDGs bidang statistik Kesejahteraan Rakyat yang bisa dipenuhi dibagi jumlah indikator SDGs yang menjadi target bidang statistik Kesejahteraan Rakyat.

Target capaian kinerja persentase indikator statistik kesejahteraan rakyat yang digunakan sebagai indikator SDGs adalah 100 persen dengan realisasi sebesar 100 persen. Sesuai dengan dokumen metadata SDGs Indonesia edisi II, terdapat 24 indikator yang dihitung dari data Susenas. Daftar indikator SDGs yang dihasilkan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2022 disajikan dalam tabel 7.

Capaian kinerja persentase indikator statistik kesejahteraan rakyat yang digunakan sebagai indikator SDGs telah mencapai 100 persen, namun bukan berarti tidak ada tantangan dalam pencapaian kinerja indikator ini. Tantangan yang dihadapi dalam capaian kinerja indikator persentase indikator statistik kesejahteraan rakyat yang digunakan sebagai indikator SDGs adalah belum seluruh indikator dapat disajikan hingga level kabupaten/kota karena RSE yang tinggi. Menjawab tantangan tersebut, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat bekerjasama dengan Polstat STIS dalam mengembangkan metode SAE.

Tabel 7
Indikator Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Digunakan Sebagai Indikator SDGs Tahun 2023

No.	Kode	Indikator
(1)	(2)	(3)
1	1.2.2*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU)
2	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan (FIES)
3	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir
4	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.
5	16.9.1*	Persentase anak berumur 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran
6	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah
7	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran
8	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat
9	4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat
10	4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar)
11	4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir
12	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)
13	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi
14	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun
15	11.1.1.(a)	Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau
16	3.1.2*	Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 Tahun yang melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan
17	1.4.1*	Persentase penduduk hidup dalam rumah tangga yang mempunyai akses pada pelayanan dasar.
18	1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan
19	3.8.1.[a]	<i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan
20	3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.
21	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun

No.	Kode	Indikator
22	6.1.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman
23	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun
24	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga

3.1.4. Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat menunjukkan kemampuan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sebagai instansi pembina statistik K/L/D/I dalam pemberian pembinaan statistik Kesejahteraan Rakyat kepada K/L/D/I. Capaian kinerja indikator ini diukur dengan membandingkan Jumlah K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dibagi dengan jumlah K/L/D/I yang menjadi target pembinaan dari Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.

Target capaian Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat adalah 100 persen dengan realisasi sebesar 109,1 persen sehingga capaian untuk indikator ini adalah 109,1 persen. Sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yaitu melaksanakan penyelenggaraan statistik rumah tangga, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan perumahan maka K/L yang menjadi mitra kerja dan menjadi target pembinaan statistik hingga tahun 2024 adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pangan Nasional, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Keuangan.

Selama tahun 2023, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat juga berperan aktif dalam pembinaan statistik sektoral yang dikoordinir oleh Biro Perencanaan BPS. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut melibatkan enam orang pegawai Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang tergabung dalam Tim Penilai Badan (TPB) sebagai evaluator penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Sepanjang tahun 2023, tim tersebut melakukan evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja indikator “persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat” adalah masih terdapat K/L belum memiliki walidata karena tidak memiliki unit organisasi yang menangani data. Selain itu pemahaman K/L terhadap kegiatan statistik secara umum maupun statistik sektoral belum merata. Strategi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dalam menghadapi kendala tersebut adalah mengadakan pertemuan pembinaan statistik sektoral dengan mengundang K/L mitra kerja.

3.1.5. Persentase aktivitas pembinaan statistik kesejahteraan rakyat yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan

Persentase aktivitas pembinaan statistik kesejahteraan rakyat yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan menunjukkan kemampuan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sebagai instansi pembina statistik dalam pemberian pembinaan statistik kepada K/L/D/I. Capaian kinerja indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan dibagi dengan jumlah aktivitas pembinaan statistik untuk K/L/D/I yang ditargetkan.

Target capaian persentase aktivitas pembinaan statistik kesejahteraan rakyat yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan adalah 100 persen dengan realisasi sebesar 116,7 persen sehingga capaian untuk indikator ini adalah 116,7 persen. Dalam melaksanakan pembinaan statistik sektoral kepada K/L, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat berpedoman pada rencana aksi pembinaan statistik sektoral sebagaimana terdapat dalam buku Arah Perubahan Badan Pusat Statistik 2021–2024.

Kegiatan pembinaan statistik sektoral lainnya dari Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yaitu pelaksanaan kegiatan Fullday Pembinaan Statistik Sektoral. Kegiatan tersebut dilaksanakan satu hari di Fraser Residence Sudirman Jakarta dengan mengundang Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kemenko PMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama, KPPPA, Bapanas, Setwapres, BPIP, Kementerian Sosial, BKKBN dan KLHK. Dalam kegiatan tersebut disampaikan pemaparan materi terkait dengan Perkembangan Satu Data Indonesia,

Penyelenggaraan Statistik Sektor (GSBPM-*Generic Statistical Business Process Model*), Sistem Statistik Nasional dan Mekanisme EPSS (*Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor*) sebagai Upaya Peningkatan Statistik Sektor yang dilanjutkan dengan diskusi. Output dari kegiatan pembinaan sektoral adalah meningkatnya penguatan statistik sektoral K/L/D/I di bidang kesejahteraan rakyat. Kementerian/Lembaga yang mendapat pembinaan dari BPS menjadi paham tentang statistik kesejahteraan rakyat. Persentase aktivitas pembinaan statistik kesejahteraan rakyat yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan menunjukkan kemampuan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sebagai instansi pembina statistik dalam memberikan pembinaan statistik kepada K/L/D/I. Kendala yang dihadapi dalam kegiatan pembinaan sektoral adalah pembinaan yang dilakukan hanya sebagian dari rangkaian kegiatan statistik dan belum memberikan pembinaan secara utuh untuk satu kegiatan statistik.

Kegiatan pembinaan statistik sektoral tematik yang dilaksanakan oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat untuk K/L pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan penghitungan indikator pembentuk IPA/IPKA/IPHA level kabupaten/kota dan penghitungan indikator pembentuk Indeks Kualitas Keluarga (IKK) level nasional, provinsi dan kabupaten/kota untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA);
2. Pendampingan penghitungan FSVA dengan metode Small Area Estimation (SAE) untuk Badan Pangan Nasional (NFA);
3. Pendampingan penyusunan Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS) untuk Sekretariat Wakil Presiden;
4. Pendampingan pengolahan data biaya kesehatan rumah tangga untuk penyusunan National Health Account (NHA) dengan Kementerian Kesehatan;
5. Pelatihan pengolahan indikator pendidikan dari Susenas serta pendampingan penyusunan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dan Mid Term Review Report SDGs Goal 4 untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Pendampingan penyusunan Indeks Aktualisasi Pancasila untuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
7. Pendampingan penyusunan Indeks Capaian Revolusi Mental untuk Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
8. Pelatihan pengolahan data Susenas untuk Kementerian Desa dan PDT;

9. *In house training* pengolahan data Susenas untuk Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
10. *Knowledge sharing* pengukuran kesejahteraan menggunakan MODA untuk Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

Capaian kinerja indikator “persentase aktivitas pembinaan statistik kesejahteraan rakyat yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan” telah melampaui target 100 persen, hal ini menunjukkan bahwa Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat telah mampu mengatasi kendala yang dihadapi. Kendala dalam capaian kinerja indikator ini adalah kesibukan K/L yang mengakibatkan jadwal aktivitas pembinaan lebih lambat dari rencana semula. Strategi dalam menghadapi kendala ini adalah dengan menguatkan koordinasi dengan K/L terkait. Selain itu, terdapat K/L yang mengajukan permintaan aktivitas pembinaan baru yang mengakibatkan capaian kinerja indikator tetap terpenuhi.

Kendala lainnya yang dihadapi dalam capaian kinerja indikator ini adalah rencana pertemuan pembinaan statistik sektoral dengan K/L mitra kerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat harus ditunda dari rencana semula karena menunggu nilai EPSS K/L dirilis. Selain itu, belum terdapat acuan baku dalam penyelenggaraan aktivitas pembinaan statistik sektoral. Dalam menghadapi dua kendala tersebut, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Diseminasi Statistik dan Sekretariat Pembinaan Statistik Sektoral BPS.

3.2. Perkembangan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Pembahasan mengenai perkembangan capaian indikator pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya merupakan hal yang penting untuk diperhatikan untuk keperluan penentuan target indikator kinerja pada tahun berikutnya. Indikator yang telah mencapai target yang telah ditetapkan dapat dipertahankan atau ditingkatkan capaian kinerjanya pada tahun berikutnya, sedangkan indikator yang tidak dapat dicapai pada tahun berjalan perlu dilakukan reviu terhadap target tahun berikutnya apakah masih relevan untuk dapat dicapai pada tahun-tahun berikutnya. Sementara, indikator dengan tingkat realisasi lebih tinggi dari target jangka menengah, perlu pula dilakukan reviu terhadap target kinerja yang akan ditetapkan apakah target pada renstra akan tetap dipertahankan atau akan ditingkatkan sesuai dengan kemampuan yang tergambar pada realisasi kinerja tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

Tabel 8
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022-2023

Kode	Uraian	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
T1	Menyediakan data statistik kesejahteraan rakyat untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan.	Persen	100,0	102,0	+2,0%
S1	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas.	Persen	100,0	102,0	+2,0%
T2	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional dibidang kesejahteraan rakyat.	Persen	114,9	112,9	-2,0%
S2	Meningkatnya Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I di Bidang Kesejahteraan Rakyat.	Persen	114,9	112,9	-2,0%

Tabel 8 memberikan informasi perbandingan rata-rata capaian kinerja sasaran dan tujuan Tahun 2023 terhadap tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022. Capaian indikator tujuan 1 dan indikator kinerja sasaran 1 pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,0 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Meskipun capaian indikator tujuan 2 dan indikator kinerja sasaran 2 pada tahun 2023 lebih rendah 2,1 persen dibandingkan dengan tahun 2022 namun capaiannya sudah di atas 100 persen. Perbandingan capaian kinerja secara lebih rinci pada masing-masing indikator kinerja disajikan pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9
Capaian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021-2022

Kode	Uraian	Satuan	2022			2023			Perubahan (Persen)
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
T1	Menyediakan data statistik kesejahteraan rakyat untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan.				100,0			102,0	2,0
S1	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang				100,0			102,0	2,0
1.1	Persentase publikasi statistik kesejahteraan rakyat yang menyertakan informasi akurasi data	Persen	100,0	100,0	100,0	100,0	105,9	105,9	5,9
1.2	Persentase indikator statistik kesejahteraan rakyat yg digunakan dalam dokumen RPJMN	Persen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0

Kode	Uraian	Satuan	2022			2023			Perubahan (Persen)
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.3	Persentase indikator statistik kesejahteraan rakyat yg digunakan sebagai indikator SDGs	Persen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
T2	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional dibidang kesejahteraan rakyat.				115,0			112,9	-2,1
S2	Meningkatnya Penguatan Statistik Sektor K/L/D/I di Bidang Kesejahteraan Rakyat.				115,0			112,9	-2,1
2.1	Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Persen	91,0	100,0	109,9	100,0	109,1	109,1	-0,8
2.2	Persentase aktivitas pembinaan statistik kesejahteraan rakyat yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan	Persen	100,0	120,0	120,0	100,0	116,7	116,7	-3,3

Salah satu hal yang perlu dipantau dalam pengukuran kinerja adalah perbandingan capaian kinerja tahunan terhadap rencana kinerja jangka menengah. Hal ini penting untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian tahun berjalan dan besarnya kesenjangan/selisih capaian kinerja terhadap target yang harus dicapai dalam jangka menengah. Oleh karena itu, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat telah melakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2022-2023 terhadap target akhir Renstra yaitu di tahun 2024 yang dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini.

Tabel 10
Monitoring Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022 Terhadap Target Kinerja Jangka Menengah Tahun 2020-2024

Kode	Uraian	Satuan	Realisasi		Target Renstra			
			2021	2023	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T1	Menyediakan data statistik kesejahteraan rakyat untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan.							
S1	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang							
1.1	Persentase publikasi statistik kesejahteraan rakyat yang menyertakan informasi akurasi data	Persen	100	105,9	100	100	100	100
1.2	Persentase indikator statistik kesejahteraan rakyat yg digunakan dalam dokumen RPJMN	Persen	100	100,0	100	100	100	100

Kode	Uraian	Satuan	Realisasi		Target Renstra			
			2021	2023	2021	2022	2023	2024
1.3	Persentase indikator statistik kesejahteraan rakyat yg digunakan sebagai indikator SDGs	Persen	100	100,0	100	100	100	100
T2	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional dibidang kesejahteraan rakyat.							
S2	Meningkatnya Penguatan Statistik Sektor K/L/D/I di Bidang Kesejahteraan Rakyat.							
2.1	Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	109,1	82	91	100	100
2.2	Persentase aktivitas pembinaan statistik kesejahteraan rakyat yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan	Persen	120	116,7		100	100	100

3.3. Prestasi dan Inovasi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023

Prestasi yang dicatatkan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2023 diantaranya adalah:

1. Keikutsertaan pegawai Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dalam pelatihan di luar negeri
 - a. Idha Sahara, S.Si., M.Si, mengikuti *6th Meeting of The Sub-Group on Gender Statistics Training (SGGST)* yang diselenggarakan oleh UN Women pada tanggal 4-8 Juni 2023 di Chiba, Jepang;
 - b. Idha Sahara, S.Si., M.Si, mengikuti *8th Meeting of The Sub-Group on Gender Statistics Training (SGGST)* yang diselenggarakan oleh UN Women pada tanggal 13-17 November 2023 di Bangkok, Thailand;
 - c. Ofi Ana Sari, S.S.T., M.E.K.K, mengikuti *Subregional Training on Gender Statistics for Monitoring the Sustainable Development Goals* yang diselenggarakan oleh UNSIAP dan KOSTAT di Daejeon, Korea Selatan, pada tanggal 30 Oktober s.d. 3 November 2023;
 - d. Siswi Puji Astuti, S.S.T., S.E., M.Si dan Sapta Hastho Ponco, S.S.T., M.Stat menerima Australia Awards Fellowship “Mapping child malnutrition trends and determinants in Indonesia with spatial epidemiology and Bayesian regression” yang diselenggarakan pada tanggal 5 November s.d. 3 Desember 2023 di University of Sydney, Australia.

2. Siswi Puji Astuti, S.S.T., S.E., M.Si terpilih sebagai Insan Statistik Teladan Kedeputian Bidang Statistik Sosial Tahun 2023.

3.4. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2023

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat didukung oleh dana yang bersumber dari APBN. Anggaran keuangan yang diajukan dan ditetapkan untuk Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat telah didasarkan pada Rencana Strategis Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2020-2024 dan telah disusun secara realistis dengan memperhatikan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Dalam pengelolaan/ penatausahaan anggaran telah menggunakan rasio kehematan, efisiensi, efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Tabel 11
Realisasi Anggaran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
Berdasarkan Rincian Output Periode 2021-2022

Unit Kerja	2022			2023		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Pagu (Rp)	Realisasi(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pembinaan Statistik Sektoral	14.236.000	13.325.400	95,8	73.048.000	61.685.355	84,4
Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat	2.005.702.000	1.907.891.039	95,1	2.603.263.000	2.071.617.152	79,6
Publikasi/Laporan Susenas	826.262.000	806.082.063	97,6	6.508.003.000	636.660.218	9,8
Total	2.846.200.000	2.727.298.502	95,8	9.184.314.000	2.769.962.725	30,2

Tabel 11 memberikan informasi Nilai DIPA Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat pada tahun anggaran 2023 yaitu sebesar Rp9.184.314.000, - yang direalisasikan melalui Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Tingkat capaian realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.769.962.725,-. Secara keseluruhan realisasi anggaran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2023 sebesar 30,2 persen. Anggaran yang tidak terealisasi pada tahun 2023 adalah anggaran keterpaduan yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab Biro Umum yaitu pengiriman

dokumen Susenas Kor sebesar Rp765.800.000,-, pengadaan computer supplies, ATK, dan consummable/toner mesin cetak sebesar Rp5.517.814.000,-.

Kinerja anggaran yang dikelola oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat sendiri pada tahun 2023 sudah cukup baik yaitu sebesar 95,5 persen. Anggaran yang dikelola oleh artinya Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2023 tanpa memasukkan anggaran untuk pengadaan computer supplies, ATK, dan consummable/toner mesin cetak adalah sebesar Rp2.900.700.000,- sengan realisasi sebesar Rp2.769.962.725,-. Pembahasan selanjutnya mengenai kinerja anggaran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2023 akan menggunakan acuan dasar hitung tersebut.

Tabel 10
Komposisi Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, Periode 2022-2023

Uraian		2022			2023		
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Komposisi Penyerapan Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Komposisi Penyerapan Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
521211	Belanja Bahan	49.830.000	49.713.959	99,8	15.116.000	14.640.000	96,9
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.788.744.000	1.716.010.160	95,9	1.415.370.000	1.412.643.512	99,8
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	56.400.000	56.319.735	99,9	-	-	-
522151	Belanja Jasa Profesi	7.800.000	7.800.000	100,0	24.400.000	15.800.000	64,8
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	410.356.000	387.554.648	94,4	585.444.000	496.564.213	84,8
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450.000	450.000	100,0	4.800.000	0	0,0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	532.620.000	509.450.000	95,6	855.570.000	830.315.000	97,0
Jumlah		2.846.200.000	2.727.298.502	95,8	2.900.700.000	2.769.962.725	95,5

Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja pada tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada Tabel 10 di atas. Komposisi anggaran belanja terbesar pada tahun 2023 adalah pada jenis belanja Barang Non Operasional Lainnya sebesar 48,8 persen dari total anggaran, yang termasuk jenis belanja ini adalah dana hibah kerjasama UNICEF. Jenis belanja lainnya dengan porsi anggaran yang cukup besar adalah belanja perjalanan biasa yang mencapai 20,2 persen dan belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebesar 29,5 persen. Pada anggaran tahun 2023 tidak terdapat lagi belanja barang non operasional - penanganan pandemi COVID-19. Jenis belanja yang mengalami peningkatan persentase realisasi pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 adalah belanja barang non operasional lainnya dari 95,9 persen pada tahun 2022 menjadi 99,8 persen di tahun 2023, dan belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 97,0 persen dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 95,6 persen.

Efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dihitung dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja. Rumus yang digunakan dalam perhitungan efisiensi anggaran yaitu:

$$\text{Efisiensi Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

Berdasarkan metode perhitungan tersebut, efisiensi anggaran yang dilakukan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2023 adalah sebesar 88,9 persen yang berasal dari besaran realisasi anggaran 95,5 persen mampu untuk mewujudkan rata-rata capaian kinerja hingga 107,4 persen. Besaran efisiensi anggaran berdasarkan Indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada Tabel 11. Efisiensi pada indikator sasaran “Meningkatnya pemanfaatan data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas” sebesar 93,9 persen yang berasal dari realisasi anggaran 95,8 persen dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 102,00 persen. Berikutnya, efisiensi untuk indikator sasaran “Penguatan Statistik sektoral K/L/D/I di bidang Statistik Kesejahteraan Rakyat” mencapai 74,8 persen yaitu dengan realisasi anggaran sebesar 84,4 persen mampu mewujudkan rata-rata capaian kinerja sasaran sampai dengan 112,9 persen.

Tabel 11

Efisiensi Penggunaan Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, Periode 2021-2022

Kode	Uraian	Rata-Rata Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran			
			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persen Realiasi	Efisiensi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
T1	Menyediakan data Statistik Kesejahteraan Rakyat untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	102,0	2.827.652.000	2.708.277.370	95,8	93,9
S1	Meningkatnya pemanfaatan data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	102,0	2.827.652.000	2.708.277.370	95,8	93,9
T2	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional di bidang kesejahteraan rakyat	112,9	73.048.000	61.685.355	84,4	74,8
S2	Penguatan Statistik sektoral K/L/D/I di bidang Statistik Kesejahteraan Rakyat	112,9	73.048.000	61.685.355	84,4	74,8
Total		107,4	2.900.700.000	2.769.962.725	95,5	88,9

PENUTUP

- Kesimpulan
- Rencana Tindak Lanjut

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Capaian kinerja tujuan dan sasaran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2023 secara rata-rata mencapai 107,4 persen, dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 95,5 persen. Dari lima indikator kinerja yang ditetapkan melalui perjanjian kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dengan Deputi Bidang Statistik Sosial, seluruh indikator kinerja mampu memenuhi target yaitu sebesar 100 persen dengan tiga diantaranya mampu mencapai lebih dari 100. Dengan demikian dapat disimpulkan rata-rata capaian kinerja baik dari keseluruhan indikator tujuan maupun pada masing-masing indikator sasaran telah mencapai nilai 100 persen atau lebih dan masuk dalam kategori A.

Capaian kinerja “Persentase publikasi statistik kesejahteraan rakyat yang menyertakan informasi akurasi data” dengan target 100 persen pada tahun 2023 mampu direalisasikan sebesar 105,9 persen oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. Target capaian kinerja “Persentase indikator statistik kesejahteraan rakyat yang digunakan dalam dokumen RPJMN” dan “Persentase indikator statistik kesejahteraan rakyat yang digunakan sebagai indikator SDGs” adalah 100 persen dengan realisasi sebesar 100 persen. Untuk target capaian “Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat” adalah 100 persen dengan realisasi sebesar 109,1. Indikator “Persentase aktivitas pembinaan statistik kesejahteraan rakyat yang dilakukan untuk K/L/D/I” telah direalisasikan sebesar 116,7 persen dengan targetnya sebesar 100 persen.

Anggaran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.900.700.000,- dan direalisasikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.769.962.725,- atau sebesar 95,5 persen. Dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 107,4 persen dan realisasi anggaran sebesar 95,5 persen, maka efisiensi anggaran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2023 mencapai 88,9 persen.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari seluruh kegiatan di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat selama tahun 2023 direpresentasikan dalam bentuk akuntabilitas kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. Berbagai upaya perbaikan baik teknis maupun non teknis, terus dilakukan guna menyempurnakan tingkat keberhasilan capaian kinerja untuk mewujudkan Renstra tahun 2020 – 2024. Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi

dan tugas Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat baik.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan ulasan capaian kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata capaian kinerja baik. Namun demikian Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat tidak berpuas diri dan terus meningkatkan capaian masing-masing indikator kinerja secara maksimal sesuai dengan target. Dibutuhkan dukungan seluruh Fungsi untuk mewujudkan capaian kinerja yang lebih optimal dengan efisiensi yang lebih baik.

Secara umum, berbagai tantangan yang dihadapi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat telah disampaikan secara detail pada bagian potensi dan permasalahan. Berbagai tantangan yang telah dapat diidentifikasi sebelumnya memerlukan berbagai tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepercayaan terhadap penggunaan data Susenas dengan berbagai ragam data Susenas ditindaklanjuti dengan mewujudkan beragam publikasi dan analisis data sesuai kebutuhan pengguna data. Ragam publikasi yang tercantum sesuai target maupun beragam publikasi dan analisis tambahan yang disosialisasikan pada berbagai pihak kementerian/lembaga, akademisi, dan masyarakat luas sehingga memberikan manfaat dan dampak pengambilan kebijakan berbasis data yang semakin baik.
2. Seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan Susenas semakin optimal memenuhi standar operasional yang ditetapkan, dengan demikian diharapkan berdampak pada kualitas data yang dihasilkan.
3. Peningkatan anggaran sebagai upaya pemberian souvenir yang lebih baik terus diupayakan dengan tujuan meningkatkan partisipasi responden secara maksimal.
4. Strategi guna meningkatkan daya tarik petugas lapangan yang berkualitas di tengah tumpang tindihnya kegiatan lapangan di kabupaten/kota diantaranya dilakukan dengan upaya peningkatan biaya pendataan rumah tangga yang lebih baik terutama sesuai beban tugas Susenas yang semakin menantang.
5. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengomunikasikan berbagai temuan di bidang pengolahan yang telah berlaku sebelumnya terus diupayakan sehingga

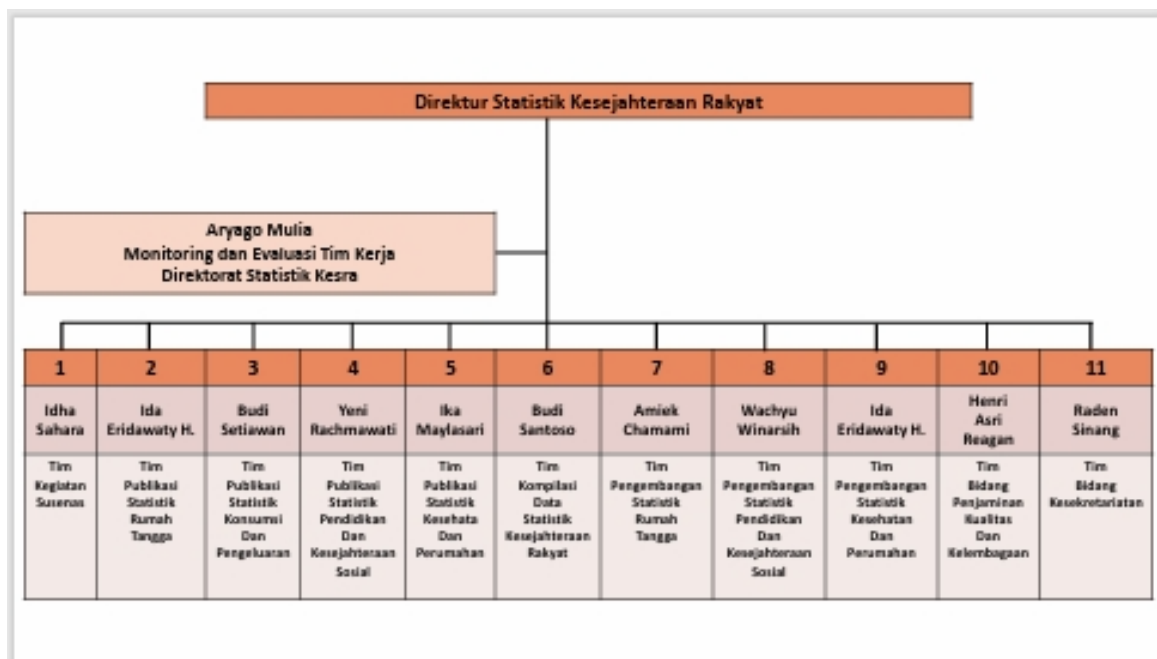
program entri yang dibangun telah memiliki kualitas lebih baik dan minim perbaikan program entri data.

6. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat terus diupayakan terutama dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas secara periodik dan berkesinambungan. Selain itu, kesempatan tugas belajar pada jalur formal seperti melanjutkan pendidikan jenjang S2 dan S3 sehingga peningkatan kualitas SDM semakin baik.
7. Inovasi sesuai perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan statistika juga perlu terus diselaraskan guna meningkatkan kualitas data yang dihasilkan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat di masa mendatang.
8. Peningkatan inovasi dalam proses bisnis kegiatan statistik di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat seperti proses workshop intama, pelatihan innas, dan pelatihan petugas Susenas.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Bagan Organisasi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023



Lampiran 2 Rencana Strategis Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020 – 2024

REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2020-2024

Unit Kerja : Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Visi : Penyedia Data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas untuk Indonesia Maju

Misi :

1. Menyediakan statistik kesejahteraan rakyat berkualitas yang berstandar nasional dan internasional.
2. Membina K/L/D/Imelalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik kesejahteraan rakyat untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tujuan 1: Menyediakan data statistik kesejahteraan rakyat untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan.							
Sasaran 1: Meningkatnya pemanfaatan data statistik kesejahteraan rakyat yang berkualitas.	Persentase publikasi statistik kesejahteraan rakyat yang menyertakan informasi akurasi data	Persen		100	100	100	100
	Persentase indikator statistik kesejahteraan rakyat yang digunakan dalam dokumen RPJMN	Persen		100	100	100	100
	Persentase indikator statistik kesejahteraan rakyat yang digunakan sebagai indikator SDGs	Persen		100	100	100	100
Tujuan 2: Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional di bidang statistik kesejahteraan rakyat.							
Sasaran 2: Penguatan statistik sektoral di K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Persen		82	91	100	100

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase aktivitas pembinaan statistik kesejahteraan rakyat yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan	Persen			100	100	100

Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT
BADAN PUSAT STATISTIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Avenzora, S.E., M.S.E
Jabatan : Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ateng Hartono, S.E., M.Si
Jabatan : Deputy Bidang Statistik Sosial
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Ateng Hartono, S.E., M.Si
NIP. 19690109 199211 1 001

Jakarta, 14 Januari 2023
Pihak Pertama

Ahmad Avenzora, S.E., M.S.E
NIP. 19690313 199101 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tujuan/Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Satuan (3)	Target (4)
Tujuan 1. Menyediakan data Statistik Kesejahteraan Rakyat untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
Meningkatnya pemanfaatan data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	Persentase publikasi statistik kesejahteraan rakyat yang menyertakan informasi akurasi data (%)	Persen	100
	Persentase Indikator statistik kesejahteraan rakyat yang digunakan dalam dokumen RPJMN (%)	Persen	100
	Persentase indikator statistik kesejahteraan rakyat yang digunakan sebagai indikator SDGs (%)	Persen	100
Tujuan 2. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional di bidang statistik kesejahteraan rakyat.			
Penguatan statistik sektoral di K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat (%)	Persen	100
	Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	Persen	100

Kegiatan

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan
Rakyat

Anggaran

Rp. 9.542.316.000,-

Pihak Kedua



Dr. Ateng Hartono, S.E., M.Si
NIP. 19690109 199211 1 001

Jakarta, 14 Januari 2023

Pihak Pertama



Ahmad Avenzora, S.E., M.S.E
NIP. 19690313 199101 1 001

Lampiran 4. Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	Persentase publikasi statistik kesejahteraan rakyat yang menyertakan informasi akurasi data	Persen	TW I	0,0	0,0	0,0
			TW II	23,5	23,5	23,5
			TW III	35,3	35,3	35,3
			TW IV	100,0	105,9	105,9
	Persentase indikator statistik kesejahteraan rakyat yang digunakan dalam dokumen RPJMN	Persen	TW I	0,0	0,0	0,0
			TW II	0,0	0,0	0,0
			TW III	0,0	0,0	0,0
			TW IV	100,0	100,0	100,0
	Persentase indikator statistik kesejahteraan rakyat yang digunakan sebagai indikator SDGs	Persen	TW I	100,0	100,0	100,0
			TW II	100,0	100,0	100,0
			TW III	100,0	100,0	100,0
			TW IV	100,0	100,0	100,0
Penguatan statistik sektoral di K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Persen	TW I	27,3	27,3	27,3
			TW II	36,4	45,5	45,5
			TW III	54,5	72,7	72,7
			TW IV	100,0	109,1	109,1
	Persentase aktivitas pembinaan statistik kesejahteraan rakyat yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan	Persen	TW I	33,3	33,3	33,3
			TW II	50,0	58,3	58,3
			TW III	83,3	91,7	91,7
			TW IV	100,0	116,7	116,7

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Soetomo No. 6-8 Jakarta 10710



Telp: (021)3841195, 3842508, 3810291-4
Fax: (021)3857046



Email: bpsdq@bps.go.id



Homepage: <http://www.bps.go.id>